

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris) dan Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mana salah satu kabupatennya yaitu Konawe, menjadikan pertanian sebagai lahan pencaharian bagi sebagian besar penduduknya. Bagi rakyat Indonesia tanah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar komoditi, tanah dipandang sebagai anugrah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup rakyat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Namun sering timbul permasalahan pertanahan yang merupakan salah satu akibat dari semakin meningkatnya pembangunan pada era saat ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan kepentingan masyarakat terutama dalam bidang pertanahan. Perbedaan kepentingan yang mengakibatkan permasalahan di bidang pertanahan dalam masyarakat baik antar individu, individu dengan pemerintah akan terus berlanjut seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah. Untuk bisa mencapai maksud tersebut maka tanah perlu diatur penguasaan, penggunaan dan pemafaatannya secara optimal. Oleh karena itu laju penggunaan tanah perlu dikendalikan sehingga fungsi tanah nantinya untuk kesejahteraan hajat hidup masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Mengapa Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian belum Efektif dan untuk mengetahui bagaimana cara Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian melalui Pendaftaran Tanah. Serta yang menjadi hambatan-hambatan dan solusi dalam Penegndalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, menggunakan data wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif.

Hasil Penelitian Penyebab Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian dalam perspektif Pendaftaran Tanah kurang efektif hal ini di akibatkan konflik kepentingan antara pemerintah, tuntutan ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pentingnya Tanah pertanian untuk ketahanan pangan, yang mengakibatkan banyak tanah pertanian beralihfungsi menjadi tanah non pertanian. Dalam hal ini BPN/ATR tidak dapat berbuat banyak karena kendala perijinan pengalihfungsian tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. 2) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dari segi yuridis bahwa tidak adanya peraturan mengenai sanksi apabila pemilik tanah tidak mendaftarkan tanahnya. Sehingga Pengawasan pemerintah melalui BPN/ATR dalam rangka pengendalian penguasaan tanah pertanian menjadi kurang efektif.

Kata Kunci : Tanah Pertanian, Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Pendaftaran Tanah.

ABSTRACT

Indonesia is a country where most of the population makes a living in agriculture (Agraris) and Southeast Sulawesi is one of the regions in Indonesia where one of the districts, Konawe, makes agriculture a livelihood land for most of its population. just a commodity, land is seen as a gift that is used maximally for the survival of the people towards the prosperity and welfare of the nation. However, land problems often arise which are one of the consequences of the increasing development in the current era. One of the contributing factors is the public interest, especially in the land sector. Differences in interests which are problems in the land sector in society, both between individuals, individuals and the government will continue along with the increasing need for land. To achieve this purpose, the land needs to be regulated for optimal control, use and utilization. Therefore, the rate of land use needs to be controlled so that the function of the land will be for the welfare of the community.

The purpose of this study was to find out why control over control of agricultural land has not been effective and to find out how to control control of agricultural land through land registration. As well as the obstacles and solutions in controlling the control of agricultural land.

The method used in this research is sociological juridical method, the data used in this study are primary data and secondary data, using interview data, questionnaires and literature study, which are then analyzed using qualitative methods with descriptive purposes.

The results of the research on the causes of controlling control of agricultural land from the perspective of land registration are not effective, this is due to conflicts of interest between the government, economic demands and a lack of public understanding of the importance of agricultural land for food security, which results in many agricultural lands being converted to non-agricultural lands. In this case, BPN / ATR cannot do much because of the problems in the land conversion permit issued by the local government. 2) Dominant factors causing Government Regulation Number. 24 of 1997 concerning Land Registration from a juridical perspective that there is no regulation regarding sanctions if land owners do not register their land. So that government supervision through BPN / ATR in the context of controlling control of agricultural land becomes less effective.

Keywords: Agricultural Land, Agricultural Land Control Control, Land Registration.